

ABSTRAK

Annisa Rahmayanti : Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama reformasi sektor publik. Salah satu bentuk dari pertanggung jawaban agen, dalam hal ini pemerintah adalah pengelolaan keuangan daerah. Tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi kegiatan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, BPKA Kota Bandung masih belum bisa melaksanakannya dengan baik. Hal itu terlihat dari data bahwa penyerapan anggaran yang dilakukan BPKA Kota Bandung tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada BPKA Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan keuangan daerah menurut Yani (2013: 348) yaitu “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.” Dan teori Akuntabilitas Publik menurut Mahmudi dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kinerja Sektor Publik (2015 : 9) “Kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*)”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner disebarikan kepada 27 orang staff BPKA Kota Bandung dengan menggunakan teknik *Random Sampling* (Acak).

Berdasarkan teori dan metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,05) hasil di peroleh dari t tabel sebesar 2,060. Hal ini dapat dinyatakan bahwa X_1 ($5,380 > 2,060$), X_2 ($4,038 > 2,060$), X_3 ($1,944 > 2,060$) dan X ($4,545 > 2,060$). Dari hasil yang di sebutkan di atas, terlihat bahwa t hitung dari dimensi perencanaan dan penganggaran keuangan daerah (X_1), pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah (X_2) dan pengelolaan keuangan daerah (X) lebih besar daripada t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H_a di terima dan H_o di tolak. Sedangkan dimensi pertanggungjawaban keuangan daerah (X_3) H_a di tolak dan H_o di terima.

Kata Kunci : *Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Publik, BPKA Kota Bandung*

ABSTRACT

Annisa Rahmayanti: Effects of Regional Financial Management on Public Accountability at the Bandung City Financial and Asset Management Agency

Public accountability is an agent's obligation to manage resources, report and disclose all activities and activities related to the use of public resources to the creditor. The realization of accountability is the main objective of public sector reform. One form of agent responsibility, in this case the government is managing regional finance. But in the management of regional finance which includes regional financial planning and budgeting activities, the Bandung still cannot implement it properly. It can be seen from the data that the absorption of the budget carried out by the Bandung City did not reach the predetermined target.

The purpose of this study was to find out and explain how much influence regional financial management has on public accountability in the Bandung City BPKA.

This study uses the theory of regional financial management according to Yani (2013: 348), namely "Overall activities that include planning, implementation, administration, reporting, accountability and supervision of regional finance." And Public Accountability theory according to Mahmudi in his book entitled Public Sector Performance Management (2015: 9) "The obligation of agents to manage resources, report and disclose all activities and activities related to the use of public resources to the party giving the mandate (principal)".

The method used in this study is associative research with a quantitative approach. Data is collected through observation, questionnaires and literature. The questionnaire was distributed to 27 BPKA staff in the city of Bandung using Random Sampling techniques.

Based on the theory and research method used, this study shows that with 2-sided testing (significance = 0.05) the results obtained from t table are 2.060. This can be stated that X1 (5,380 > 2,060), X2 (4,038 > 2,060), X3 (1,944 > 2,060) and X (4,545 > 2,060). From the results mentioned above, it can be seen that t counted from the dimensions of regional financial planning and budgeting (X1), the implementation and administration of regional finance (X2) and regional financial management (X) is greater than t table, it can be concluded that Ha in accept and Ho rejected. While the dimensions of regional financial responsibility (X3) Ha were rejected and Ho was accepted.

Keywords: *Regional Financial Management, Public Accountability, Bandung City BPKA*